

Komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung

Moni Febrianti¹; Erwin²; Jendrius³

Universitas Andalas, Padang^{1,2,3}

Email : monifebrianti@gmail.com¹; erwin_antro@yahoo.com²;
jendrius@soc.unand.ac.id³

Abstrak

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada penataan lingkungan untuk mengurangi kawasan padat, kumuh dan miskin. Penelitian ini dilakukan untuk melihat proses komunikasi partisipatif yang terjadi dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program PLPBK di Nagari Solok Ambah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dianalisis menggunakan model komunikasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan proses komunikasi partisipatif tidak terjadi pada seluruh tahapan proses program. Beberapa hambatan selama proses komunikasi yang kemudian mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan Program PLPBK yang utama adalah dipengaruhi faktor psikologis, dimana secara umum masyarakat Nagari Solok Ambah tidak kritis dan menerima setiap keputusan yang ada sehingga pada saat penentuan pembangunan fisik, masyarakat menerima saja usulan yang disampaikan oleh tim koordinator kota (korkot) untuk pembangunan jalan. Faktor karakteristik perilaku khalayak yaitu, perilaku komunikasi Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan Badan Keswaayaan masyarakat (BKM) yang tidak aktif mencari informasi tentang PLPBK termasuk juga akses informasi yang diberikan tim korkot terbatas. Sedangkan faktor sosiodemografi adalah tingkat pendidikan TIPP yang rendah sehingga tidak memahami seutuhnya pesan yang disampaikan oleh tim korkot. Sedangkan faktor pendorong keberhasilan terlaksananya program adalah peran ninik mamak yang masih kuat dalam nagari.

Key words : Proses komunikasi, model komunikasi partisipatif dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

Abstract

The PLPBK community development program is a centralized poverty settlement program to reduce dense areas, slums and poverty. This research is done to see the participatory communication process happens and obstacles affects the action of PLPBK program at Nagari Solok. The research is qualitative research and is analyzed by using participate communication models. The result of this research shows that participate communication process don't occurs in all aspects. The main factor is affected by psychological factor where generally the people of Nagari solok are not critical person and want to accept every decision issue by the city coordinator's team for road construction. The second factor is the characteristic of people's behavior which is the communication behavior of the core team participatory planning (TIPP). The

third factor is sociodemographics which that the low level of TIPP education so that it doesn't fully understand the message being conveyed by the team and the group' s less active social security system is seekibh out information about the facility as well as access to the information given by the limited dealers. Furthermore the diving factor behind their program's success, there are ninik mamak's strong role at that nagari.

Keywords: Communication process, partipacipatory communication model and community Based Settlement environment management program

PENDAHULUAN

Program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Salah satu penyebab penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sijunjung adalah dengan adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Contohnya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mulai dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2006. Sejak tahun 2007 P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mulai tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas menjadi PNPM Mandiri Perkotaan.

Secara substansi PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat bersama pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli. Dengan demikian diharapkan akan terbangun gerakan bersama penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai universal, seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabel (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan)

Salah satu program PNPM Mandiri Perkotaan adalah program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). PLPBK adalah stimulan bagi keberhasilan masyarakat di desa atau kelurahan yang menjadi sasaran program P2KP yang mampu membangun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di wilayahnya yang mencapai kualifikasi BKM berdaya. PLPBK lahir sebagai salah satu bentuk intervensi yang berupaya membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli. Jadi harus ada komitmen bersama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli untuk menata lingkungan permukiman di kawasan prioritas sesuai rencana yang disepakati bersama. Program PLPBK semestinya menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin sehingga harus melibatkan masyarakat

miskin sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif. Maka dalam pelaksanaannya diperlukan proses komunikasi yang mendengarkan aspirasi dari bawah dan adanya dialog.

Pada tahun 1976 Everett M. Rogers menyatakan kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan menerima melainkan berbagi dan dialog. Bessette (2004) lebih lanjut mengungkapkan komunikasi lebih diarahkan pada proses-proses yang memungkinkan masyarakat lebih aktif dilibatkan (*involving the community*) dan proses pembangunan itu sendiri harus dimulai dari masyarakat sebagai *spirit* utamanya. Agar program PLPBK yang akan dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka prinsip utama dari program PLPBK ini adalah partisipasi. Partisipasi bertujuan setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran aktif dari kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan prinsip tersebut komunikasi yang diperlukan melalui komunikasi partisipatif yang bersifat *bottom up*. Dalam komunikasi partisipatif mencerminkan sifat memusat yang terjadi dari pertukaran informasi yang melingkar (*cyclical*). Dalam proses komunikasi yang memusat setiap pelaku berusaha menafsirkan dan memahami informasi yang diterimanya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pelaku komunikasi dapat memberikan reaksi atau menyampaikan hasil pikirannya dengan baik kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam model ini tidak ditemukan anak panah yang menunjukkan unit informasi yang berdiri sendiri dari mana dan ke arah mana, melainkan informasi itu dibagi oleh para pelaku komunikasi sampai diperoleh kepuasan atas pengertian bersama terhadap sesuatu persoalan. Komunikasi tidak lagi dipandang aliran informasi searah, melainkan suatu proses yang interaktif, menyatu dan partisipatif (Cangara, 2014 : 52-53).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fuad Muchlis tahun 2009 yang berjudul Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada implementasi musyawarah dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Teluk Pelayung Kabupaten Batang Hari), dikemukakan bahwa dialog sebagai ciri komunikasi partisipatif juga belum terjadi pada berbagai musyawarah dalam PNPM

Mandiri Pedesaan. Hal ini dapat dilihat dimana program belum menjamin dan memberikan setiap orang hak yang sama untuk berbicara atau untuk didengar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Wahyuni tahun 2006 dengan judul Proses Komunikasi dan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus Program Reksa Dana di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor) dengan hasil pola intervensi pemerintah masih tinggi, proses komunikasi yang terjadi masih *top down*. Pola intervensi yang dilakukan membuat partisipasi masyarakat rendah karena program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan survey awal pada pelaksanaan PLPBK di Nagari Solok Ambah dan didukung beberapa penelitian terdahulu menghasilkan asumsi sementara bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, dialog sebagai ciri komunikasi partisipatif belum terjadi pada berbagai tahapan proses program. Intervensi dari pemerintah masih ada dan proses komunikasi yang terjadi masih *top down*. Komunikasi yang seharusnya berlangsung dua arah dan adanya dialog sehingga terjadi pengertian bersama terhadap pesan terutama dalam penentuan kegiatan fisik yang akan dibangun dalam PLPBK Nagari Solok Ambah tidak ditemukan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melihat bagaimana proses komunikasi sejak awal tahapan program PLPBK dilaksanakan hingga tahapan akhir, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program PLPBK di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena mampu menggambarkan kejadian atau realitas sosial dari sudut pandang subjek bukan dari sudut pandang peneliti sebagai pengamat untuk mengambil fakta berdasarkan hasil pengamatan secara rinci. Strauss & Corbin dalam Zulkarnaen, Wandy. et all. (2020:2475) berpendapat bahwa tidak seperti studi kuantitatif, pendekatan kualitatif memungkinkan penyidik mendapatkan data yang lebih rinci (*unlike quantitative studies, qualitative approaches allow investigators to obtain*

more detailed data). Lokasi penelitian ini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah wawancara mendalam, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi. Pengumpulan data penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016 : 225) dapat dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan datanya lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipan observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi (dalam wawancara mendalam peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka dengan informan secara mendalam dan terus-menerus, lebih dari satu kali) sampai informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Terakhir, adalah teknik dokumentasi yang diperoleh dengan cara menggali data sekunder dari buku-buku, dokumen, atau arsip laporan.

Mekanisme untuk memperoleh informan dalam penelitian ini adalah *purposive*, artinya mekanisme disengaja, yaitu sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014: 140). Berdasarkan uraian diatas peneliti menentukan kriteria terkait dengan pemilihan informan yaitu orang-orang yang menguasai informasi dan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program PLPBK di Nagari Solok Ambah. Maka dari itu informan penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri atas : Koordinator Tim Inti Perencanaan Partisipatif (1 orang), Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (1 orang), anggota BKM (1 orang), Wali Nagari Solok Ambah (1 orang), Asisten Kota (1 orang), fasilitator kelurahan (2 orang), ninik mamak (1 orang), tim teknis PLPBK (1 orang) dan masyarakat Nagari Solok Ambah (3 orang).

Data diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis interaktif, yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, yakni reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Data yang terkumpul dilakukan reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan ketika melakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya penyajian data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih. Terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi terhadap data penelitian yang telah di sajikan dalam bentuk

yang lebih sederhana Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir.

Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2016 : 332) analisa triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber (mengecek sumber informasi dari hasil wawancara antara *key informan* dan informan pendukung), serta triangulasi teknik (mengecek hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari informan, lalu hasilnya akan dicek dengan data observasi partisipan dan dokumentasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah cara penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan (Effendy, 1993). Komunikasi partisipatif merupakan pendekatan berdasarkan dialog, yang memungkinkan berbagi informasi, persepsi dan opini di antara *stakeholder*, dengan demikian memfasilitasi pemberdayaan mereka, terutama bagi mereka yang paling rentan dan terpinggirkan (Tuftte dan Mefalopulos, 17). PLPBK merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk membangun tatanan kehidupan warganya berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama. Salah satu ketentuan pelaksanaan PLPBK adalah melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan partisipatif mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. Maka tentu menerapkan komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program PLPBK merupakan langkah yang tepat agar program PLPBK dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Tahapan program PLPBK di Nagari Solok Ambah Kabupaten Sijunjung adalah tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan. Pertama, tahap persiapan yang merupakan sosialisasi program PLPBK, baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Nagari. Dengan pelaksanaan sosialisasi di tingkat kabupaten diharapkan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Harus dipahami bahwa tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi lebih penting dari itu adalah

menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Theresia at,al, 2015 : 212). Salah satu tujuan dilaksanakan sosialisasi dan lokakarya tingkat kabupaten agar peserta yang hadir dapat mendukung dan diharapkan dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan program PLPBK, sama seperti yang disampaikan Theresia diatas bahwa sosialisasi untuk menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam sosialisasi dan lokakarya di tingkat kabupaten dan nagari tidak terdapat komunikasi partisipatif karena sosialisasi dan lokakarya yang dilaksanakan sifatnya hanya menginformasikan. TAUP sebagai komunikator menyampaikan konsep-konsep program PLPBK. Saat sosialisasi tidak ada ruang dan kesempatan bagi komunikan untuk memutuskan sesuatu, komunikator hanya mengkomunikasikan program. Karena yang dipaparkan oleh komunikator cukup banyak dan ada juga beberapa istilah, maka setelah materi dipaparkan muncul pertanyaan dari beberapa orang komunikan. Pertanyaan tersebut disampaikan karena ada hal-hal yang tidak dipahami komunikan terutama komunikan yang berasal dari Nagari Solok Ambah, karena PLPBK merupakan program yang baru untuk mereka.

Kedua, tahap perencanaan yang terdiri atas refleksi perkara kritis dan pemetaan swadaya. Refleksi perkara kritis adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta refleksi (masyarakat) mengenai kepadatan kondisi kekumuhan dan kemiskinan serta kaitannya dengan pola perilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat setempat. Refleksi perkara kritis dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kepadatan, kekumuhan dan kemiskinan. Kasadaran kritis ini menjadi penting karena seringkali dalam berbagai program pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai objek. Seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai paya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya. Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak orang luar, bukan melaksanakan program karena benar-benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka. Kesadaran ini penting sebelum akhirnya masyarakat menyepakati bagaimana sebaiknya PLPBK dilaksanakan, kawasan prioritas lingkungan permukiman yang harus ditata, serta menyepakati

bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat miskin bersama komponen masyarakat lainnya dalam memanfaatkan akses peluang yang ada di PLPBK untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.

TIPP berusaha agar masyarakat di jorong menyadari bahwa mereka memiliki permasalahan di lingkungan mereka sendiri, jika sudah timbul kesadaran dalam diri masyarakat maka akan muncul keinginan untuk melakukan perubahan dan ikut berpartisipasi melaksanakannya. Seperti yang diungkapkan oleh Rogers dan Shoemaker, 1971 dalam Nasution (2009, 133) bahwa setidaknya ada tujuh tugas utama agen perubahan dalam melaksanakan difusi inovasi yaitu : menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan, membina suatu hubungan dalam rangka perubahan (*change relationship*), mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat, menciptakan keinginan perubahan dikalangan klien, menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan yang nyata, menjaga kestabilan perubahan dan mencegah terjadinya *drop out*, dan mencapai suatu terminal hubungan. Namun refleksi perkara kritis yang terjadi di Nagari Solok Ambah berbeda dengan kondisi idealnya, faskel langsung menetapkan kriteria Pakumis Nagari Solok Ambah.

Dari pelaksanaan refleksi perkara kritis minim terjadi diskusi antara faskel dan TIPP, sumber-penerima tidak memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran, sifatnya seperti penyampaian informasi yang harus diterima oleh TIPP yang tidak jauh berbeda dengan model komunikasi linear dimana pesan bersifat searah. Komunikasi dalam hal ini dipandang tidak lebih sebagai penerus informasi, yang bersifat mekanistik tanpa memperhatikan masyarakat. Penyebab awalnya adalah faskel yang tidak memberikan pengetahuan yang utuh kepada TIPP mengenai tugas pokok dan fungsi TIPP dalam program PLPBK di Nagari Solok Ambah, sehingga apapun yang disampaikan atau diputuskan oleh faskel diterima oleh TIPP.

Ruang dan peluang masyarakat untuk terlibat tidak terbuka sehingga tidak bisa melakukan perubahan demi keberhasilan dalam pembangunan. Refleksi perkara kritis intinya adalah membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai kondisi permukiman yang padat, kumuh dan miskin, masyarakat yang diwakili oleh TIPP membentuk kelompok-kelompok kecil dan mendiskusikan apa saja permasalahan permukiman terkait padat kumuh dan miskin sehingga masyarakat lebih sadar dan mengetahui permasalahan di permukimannya namun dalam pelaksanaannya TIPP yang mewakili

masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan permukiman apalagi dengan tujuan menimbulkan kesadaran dalam diri masyarakat mengenai permasalahan dipermukimannya. Faskel langsung memberikan list permasalahan permukiman yang terkait dengan padat, kumuh dan miskin dan itupun mengadopsi daftar refleksi perkara kritis yang dimiliki oleh Kelurahan Silungkang yang tentu saja memiliki keadaan dan permasalahan yang berbeda dengan Nagari Solok Ambah. Efeknya TIPP tidak memiliki pembelajaran dalam menetapkan permasalahan di lingkungannya sendiri padahal yang lebih mengetahui permasalahan tersebut adalah masyarakat yang ada di dalamnya bukan orang luar.

Dalam pendekatan partisipatif berlandaskan semangat kebersamaan (*togetherness, communality*) dalam mengartikulasikan dan mempersepsikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan tindakan termasuk cara-cara memecahkan masalah bersama. Konsep kebersamaan tersebut menentukan tujuan proses komunikasi sehingga semua pihak yang terlibat mempunyai kesempatan mempertukarkan dan merundingkan makna pesan (*exchange and negotiation of meaning*) menuju keselarasan dan keserasian makna bersama. Dalam pendekatan partisipatoris semua permasalahan yang dihadapi merupakan masalah bersama sehingga cara menyelesaikannya pun perlu dipikirkan bersama. Karena aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang public (*public sphere*) maka memungkinkan setiap orang mendapatkan akses informasi dan dialog yang terbuka secara merata (Dilla, 2012 :159-160)

Secara konvensional, peran pendamping hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan inovasi atau mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metode dan teknik-teknik tertentu sampai mereka (penerima manfaat) itu dengan kesadaran dan kemampuan diri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Tetapi dalam perkembangannya, peran pendamping hanya terbatas pada fungsi menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat, tetapi ia harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili dengan masyarakatnya, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima atau dilaksanakan oleh masyarakat, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/lembaga pemberdayaan yang bersangkutan (Theresia, et, al, 2015 : 175)

Faskel memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan masukan, pandangan dan kritik. Kesempatan yang diberikan untuk melihat partisipasi TIPP, kemandiriannya dan pengambilan keputusan yang dilakukan. Pada saat refleksi perkara kritis pertanyaan tentang kriteria-kriteria pakumis yang diajukan fasilitator di jawab secara rinci oleh kepala jorong dan TIPP. Dalam rapat tersebut fasilitator menggali informasi dari peserta rapat mengenai situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan di Nagari Solok Ambah melalui dialog.

Berdasarkan model komunikasi konvergen yang bersifat dua arah dengan komponen utama adalah informasi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama, jaringan hubungan sosial, maka pada refleksi perkara kritis tidak terjadi. Dari penjelasan sebelumnya dapat dilihat pada saat refleksi perkara kritis proses komunikasi bersifat searah, komunikator hanya meminta jawaban pertanyaan tentang perkara kritis yang ada di jorong masing-masing sehingga tidak tercipta saling pengertian ataupun kesepakatan bersama. Tujuan dilaksanakan refleksi perkara kritis adalah membangun kesadaran kritis peserta refleksi (komunikasikan) mengenai permasalahan lingkungannya terutama permasalahan padat, kumuh dan miskin. Namun dalam pelaksanaannya kesadaran ini tidak tumbuh karena penggalian permasalahan tidak muncul dari masyarakat namun kriteria pakumis diberikan oleh faskel.

Pengertian pemetaan swadaya adalah proses pengumpulan data dan identifikasi persoalan serta potensi kawasan prioritas yang dilakukan oleh warga masyarakat yang didampingi oleh Tenaga Ahli (TAPP). Sedangkan tujuan dilakukan pemetaan swadaya antara lain : mengidentifikasi persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai terkait permukiman di kawasan prioritas, menghasilkan prioritas persoalan yang akan menjadi fokus perencanaan kawasan prioritas, membangun tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk melakukan proses pemetaan persoalan dan potensi yang ada. Dalam pelaksanaan pemetaan swadaya juga tidak terjadi komunikasi partisipatif, karena komunikasi masih bersifat searah. Komunikasi searah karena adanya penggiringan opini yang dilakukan tim korkot. Saling pengertian yang menjadi komponen model komunikasi partisipatif juga tidak ada. Dalam pemetaan swadaya ini sebenarnya sangat terbuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya yang akhirnya menjadi sebuah keputusan. Namun ruang ini ditutup oleh pihak komunikator.

Komunikator tidak memberikan pengetahuan yang utuh kepada komunikan, termasuk dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan, seolah-olah tidak ada pilihan kegiatan selain pembangunan jalan.

Dalam proses komunikasi yang memusat, setiap pelaku berusaha menafsirkan dan memahami informasi diterimanya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pelaku komunikasi dapat memberikan reaksi atau menyampaikan hasil pikirannya dengan baik kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam model ini tidak ditemukan anak panah yang menunjukkan unit informasi yang sendiri dari mana dan ke arah mana, melainkan informasi itu dibagi oleh para pelaku komunikasi sampai diperoleh kepuasan atas pengertian bersama terhadap sesuatu persoalan. Menurut Hernando Gonzales 1985 dalam Cangara (2009) menyatakan bahwa komunikasi tidak lagi dipandang aliran informasi searah, melainkan suatu proses yang interaktif, menyatu dan partisipatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, komunikasi yang digunakan dalam penentuan pelaksanaan kegiatan bersifat *top-down* dan persuasif, masyarakat menerima yang telah ditentukan oleh faskel, oleh karena itu tidak terjadi interaktif antara keduanya. Artinya aliran informasi yang terjadi searah dan tidak terjadi proses interaktif.

Ketiga, tahap pelaksanaan yang merupakan pelaksanaan kontruksi. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang terdiri atas 10 (sepuluh) KSM. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah satu paket peningkatan jalan sepanjang 850 meter yang terdapat di Jorong Koto Ranah yang dimulai dari jembatan bawah sampai ke polongan dekat Kantor Wali Nagari Solok Ambah. Satu paket peningkatan jalan terdiri atas perbaikan jalan, membangun trotoar mini di sisi kiri dan kanan jalan dan membangun drainase di sisi kanan dan kiri jalan. Dalam pembangunan satu paket peningkatan jalan ini, jalan yang ada diperlebar di sisi kanan dan kiri sehingga tanah warga yang rumahnya terdapat di pinggir jalan terpakai lebih kurang 50cm. Lebar jalan awal adalah 3 meter dan diperlebar 50 cm samping kiri dan 50 cm ke kanan. Sedangkan untuk drainase dengan lebar 70 cm dengan dalam 70 cm dan lebar trotoar 50 cm. Untuk jalan menggunakan bahan cor beton, drainase menggunakan bahan pasang batu dan trotoar menggunakan cor beton.

Dalam penyelesaian tanah masyarakat yang terpakai ini melibatkan ninik mamak. Tidak hanya ninik mamak dari Jorong Koto Ranah saja yang diundang, Pihak Pemerintah Nagari mengundang seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Solok Ambah yang terdiri

dari 25 orang ninik mamak. Pemerintah nagari menyampaikan bahwa di Nagari Solok Ambah akan mendapat program PLPBK dari pemerintah berupa satu paket peningkatan jalan sepanjang 850 meter dari jembatan bawah sampai ke polongan dekat kantor wali nagari dan tanah masyarakat akan terpakai dengan ketentuan 170 cm batas kiri dan 170 cm kanan jalan karena jalan yang ada akan diperlebar, selain itu juga akan dibangun drainase dan trotoar.

Bagi masyarakat yang tanahnya terpakai diminta untuk merelakannya dan tidak meminta ganti rugi. Jadi ninik mamak diminta untuk menyampaikan kepada kemenakan yang tanahnya terpakai untuk merelakan tanah tersebut. Masyarakat yang tanahnya terpakai memang merelakan tanahnya tanpa meminta ganti rugi. Faskel sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan tidak turun langsung menyelesaikan permasalahan tanah, namun mendelegasikan kepada ninik mamak dalam menyampaikan tentang tanah masyarakat yang kena dampak dari pembangunan. Dalam sebuah nagari, ninik mamak menjadi orang yang dihormati oleh kaumnya, perkataannya akan didengar dan akan mudah diikuti. Kemenakan percaya dengan hal yang disampaikan oleh mamaknya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membujuk kemenakan untuk merelakan jika tanah mereka ada yang terpakai.

Syarat yang harus dimiliki seorang komunikator tersebut antara lain tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (*kredibilitas*), daya tarik (*attractive*), dan kekuasaan (*power*). Ninik mamak dalam masyarakat nagari selain memiliki kredibilitas juga memiliki power. Seperti yang disampaikan sebelumnya masing-masing ninik mamak mengumpulkan kaumnya dalam sebuah pertemuan dan menyampaikan tentang program pembangunan yang akan ada tanah masyarakat yang akan terpakai. Dengan penyampaian pesan yang baik maka pada saat pertemuan tidak ada masyarakat yang protes. Pada awal penggalian tanah untuk drainase dilakukan serentak, dan pemilik rumah yang bersangkutan yang mengerjakannya. Dari kaum perempuan juga ada yang ikut bekerja melakukan penggalian. Kaum laki-laki/bapak-bapak yang bekerja sebagai tukang digaji Rp. 60.000,- perhari, sedangkan kaum perempuan digaji Rp. 40.000,- perhari. Kaum perempuan mengambil peran saat penggalian tanah dan laki-laki pada saat pemasangan batu. kaum perempuan banyak yang terlibat dalam penggalian tanah. Kaum perempuan bekerja karena mengharapkan gaji perharinya untuk membantu ekonomi keluarga. Meski hanya mendapatkan upah per harinya Rp. 40.000,- tapi untuk

mereka jumlah tersebut sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Perkembangan pembangunan selalu diumumkan oleh pemerintahan nagari di mesjid setelah selesai sholat jumat termasuk dalam pertemuan lain yang diadakan di mesjid, diinformasikan sudah berapa persen yang terlaksana. Selain itu juga diadakan gotong royong bersama masyarakat. Gotong royong ini diadakan jika pekerjaan di lapangan ada yang membutuhkan masyarakat untuk turun tangan.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan program PLPBK Nagari Solok Ambah di beberapa tahap kegiatan dapat dikatakan efektif, karena maksud dari pesan yang disampaikan diterima dan masyarakat memberi dukungan serta ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Namun pada beberapa tahap kegiatan, proses komunikasi partisipatif dapat dikatakan tidak ada. Situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi, terutama situasi yang berhubungan dengan faktor psikologis, sosiologis dan antropologis. Faktor psikologis seringkali menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Hal ini umumnya disebabkan komunikator sebelum melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan (Effendy, 2008 : 12). Menurut Cangara (2014 : 172) faktor psikologi terdiri dari emosi, bagaimana pendapat-pendapat mereka, adakah keinginan mereka dipenuhi, adakah selama ini mereka menyimpan rasa kecewa, motivasi, dsb.

Faktor psikologis menjadi penghambat yang teridentifikasi pada proses komunikasi yang terjadi pada tahap perencanaan yaitu saat penentuan kegiatan fisik yang harus dibangun dalam program PLPBK Nagari Solok Ambah. Dari awal program PLPBK masuk ke Nagari Solok Ambah, Tim korkot sudah menyampaikan bahwa nanti akan membangun jalan, setiap ada kesempatan maka tim korkot akan memberikan wacana kepada pemerintahan nagari dan masyarakat bahwa nanti akan dibangun jalan. Karena sudah ada penggiringan opini sejak awal maka pada saat penentuan kegiatan prioritas maka secara otomatis TIPP menyetujui dengan rencana pembangunan satu paket peningkatan jalan.

Secara umum masyarakat Nagari Solok Ambah tidak kritis dan mudah dipengaruhi. Masyarakat Nagari Solok Ambah tidak kritis sehingga menjadi penyebab masyarakat hanya menurut saja dengan apa yang disampaikan oleh tim korkot ataupun dari Pemerintah Nagari. Dengan sifat yang tidak kritis, masyarakat tidak mengeluarkan aspirasinya dan cenderung mengikuti dan mendukung hal yang disampaikan oleh tim korkot. Menurut Theresia et al (2015 : 2130), seringkali terjadi bahwa partisipasi

masyarakat tidak nampak karena mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi, khususnya yang menyangkut pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil pembangunan yang akan dicapai.

Dalam pelaksanaan PLPBK di Nagari Solok Ambah tim korkot masih dominan dalam pengambilan keputusan, TIPP dan BKM yang mewakili masyarakat hanya melaksanakan apa yang disampaikan oleh tim korkot. Meski faskel memberi kesempatan pada TIPP dan BKM untuk menyampaikan pendapat, saran dan pandangan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan namun TIPP dan BKM tidak mandiri dalam pengambilan keputusan karena masih tergantung dengan apa yang disampaikan oleh faskel. Padahal TIPP dan BKM berhak mengambil keputusannya secara mandiri dengan melihat permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat sehingga diharapkan kegiatan fisik yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena TIPP dan BKM merupakan bagian dalam permasalahan yang sedang dihadapi bersama.

Dalam setiap rapat yang diadakan, akses yang sama dimiliki oleh setiap anggota TIPP dalam menyampaikan pendapat, masukan dan kritik. TIPP dan BKM ada menyampaikan pendapat dan tidak ada yang mendominasi dalam berbicara, namun kembali pada karakteristik anggota TIPP dan BKM yang ikut dengan apa yang disampaikan tim korkot. Dalam komunikasi partisipatif, TIPP yang hadir dalam pertemuan rapat bukan hanya sebagai peserta rapat melainkan terlibat dalam berpendapat, namun karena diberikan penjelasan yang masuk akal oleh tim korkot bahwa pembangunan satu paket peningkatan jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat maka akhirnya TIPP sepakat dengan keputusan tersebut. Dilihat dari respon masyarakat secara umum masyarakat senang dengan pembangunan dan merasakan manfaatnya. Dilihat secara fisik memang ada perubahan dari pembangunan, jalan menjadi jauh lebih rapi dan lapang. Setelah pelaksanaan PLPBK tahun 2014, maka pada tahun 2016 Solok Ambah kembali mendapatkan program PLPBK lanjutan dan yang menjadi pembangunan fisik adalah melanjutkan peningkatan jalan yang telah dibangun sebelumnya.

Faktor karakteristik perilaku khalayak meliputi hobi, nilai dan norma, mobilitas sosial, perilaku komunikasi (Cangara, 2014 : 173). Perilaku komunikasi menjadi faktor penghambat proses komunikasi pada pelaksanaan program PLPBK di Nagari Solok

Ambah. Masyarakat yang diwakilkan oleh TIPP dan BKM kurang aktif dalam menggali dan mencari informasi tentang PLPBK. Kehadiran dari TIPP dan BKM juga tidak maksimal, karena masing-masing punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Kesulitan ekonomi menjadi alasan anggota masyarakat yang terlibat dalam BKM dan TIPP untuk bisa hadir pada setiap pertemuan yang diadakan. Bagi mereka hal yang terpenting adalah memenuhi makan sehari-hari keluarga, dan bagi mereka jika tidak bekerja satu hari sama artinya pada hari tersebut anak istrinya tidak makan. Dengan kehadiran yang tidak optimal ditambah dengan kondisi TIPP dan BKM yang menerima saja setiap informasi yang disampaikan oleh tim korkot dan TAPP sehingga pembangunan fisik yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim korkot. Selain BKM dan TIPP yang tidak aktif mencari informasi PLPBK, akses informasi yang diterima TIPP mengenai program PLPBK tidak terbuka lebar.

Selain faktor psikologis, faktor sosiodemografi juga menjadi faktor hambatan dalam kelancaran proses komunikasi pada TIPP dan BKM. Faktor sosiodemografi meliputi jenis kelamin, usia, populasi, lokasi, tingkat pendidikan, bahasa, agama, pekerjaan, dan ideologi (Cangara, 2014 : 171). Dari faktor sosiodemografi yang menjadi hambatan adalah tingkat pendidikan TIPP. Latar belakang pendidikan TIPP beragam, ada yang tamat SMA, SMP, SD bahkan ada yang tidak tamat SD. Dengan tingkat pendidikan yang beragam tersebut, sehingga pesan yang diterima TIPP tidak seutuhnya dapat dipahami. Dalam komunikasi partisipatif individu yang melakukan komunikasi mencapai saling pengertian yang cukup satu sama lain mengenai suatu topik, setiap peserta juga menafsirkan informasinya sendiri dan informasi dibagi oleh kedua peserta. Namun dalam pelaksanaan program PLPBK di Nagari Solok Ambah, TIPP secara umum tidak memahami pesan yang di sampaikan oleh tim Korkot. Tingkat pendidikan masyarakat Nagari Solok Ambah termasuk rendah. Ini nampak pada data bahwa masih banyak yang tidak menamatkan pendidikan dasar. Hal ini antara lain disebabkan ketidakmampuan secara ekonomi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu pemahaman sebagian orangtua di Solok Ambah yang tidak paham akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anaknya yang dapat mengubah nasib mereka. Masih ada sebagian masyarakat yang malah mengajak anaknya yang masih usia sekolah ke ladang terutama untuk menyadap getah karet.

KESIMPULAN

Proses komunikasi pada tahapan pelaksanaan program PLPBK terlihat sebagian belum efektif dan belum sesuai dengan model komunikasi partisipatif. Dialog sebagai ciri komunikasi partisipatif belum terjadi pada sebagian tahapan proses program PLPBK. Faskel sebagai perpanjangan tangan pemerintah masih terlihat melakukan intervensi dan proses komunikasi yang terjadi masih bersifat *top down*. Pada tahap perencanaan, proses komunikasi yang terjadi belum efektif. Adanya penggiringan opini sejak proses awal dalam penentuan pembangunan fisik. Saat melaksanakan refleksi perkara kritis, faskel sebagai komunikator tidak memberikan pembelajaran kepada TIPP (bertindak sebagai komunikan) dalam menemukenali permasalahan permukiman yang ada di sekitarnya. TIPP tidak kritis terhadap permasalahan permukiman yang sedang mereka hadapi karena langsung diberikan kriterianya oleh faskel.

Pada tahap pelaksanaan, proses komunikasi partisipatif terlihat saat ninik mamak dilibatkan dalam hal penyampaian tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan fisik. Karena ninik mamak digunakan sebagai perantara kepada masyarakat maka secara umum masyarakat merelakan tanahnya untuk pembangunan program PLPBK. Ninik mamak dalam Nagari Solok Ambah masih memegang peranan yang cukup penting.

Beberapa hambatan selama proses komunikasi yang kemudian mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan Program PLPBK di nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang utama adalah dipengaruhi faktor psikologis, dimana secara umum masyarakat nagari Solok Ambah tidak kritis dan menerima saja setiap keputusan yang ada sehingga pada saat penentuan pembangunan fisik, masyarakat menerima saja usulan yang disampaikan oleh tim korkot untuk pembangunan jalan. Faktor karakteristik perilaku khalayak yaitu, perilaku komunikasi TIPP dan BKM yang tidak aktif mencari informasi tentang PLPBK termasuk juga akses informasi yang diberikan tim korkot terbatas. Sedangkan faktor sosiodemografi adalah tingkat pendidikan TIPP yang rendah sehingga tidak memahami seutuhnya pesan yang disampaikan oleh tim korkot.

Dalam penelitian ini, disarankan kepada pelaksana perlu memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang diterima masyarakat mengenai program memadai dan dipahami dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat dijalankan secara konsisten dan

kontinu. Hal tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengkaji kondisi sosiodemografi komunikan sasaran, serta dalam mengkomunikasikan program pemberdayaan kepada masyarakat, pelaksana program khususnya faskel perlu memiliki perencanaan atau strategi komunikasi sebagai pedoman dan panduan, sehingga hambatan dapat diminimalisir dan komunikasi menjadi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bessette, Guy. 2004. *Involving the Community a Guide to Participatory Development Communication*. Malaysia. International Development Research Centre
- Bungin, Burhan. 2013. *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa
- Dilla, Sumadi. 2012. *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2011. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: graha Ilmu
- Harun, R, Elvinaro. A. 2011. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2004. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rogers, Everett M., D, Lawrence Kincaid. 1981. *Communication Networks : Toward a New Paradigm for Research*. New York : The Free Press
- Rohim, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi : Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung. Alfabeta.
- Ruslan, Rosady. 2014. *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Perkasa
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta. Gramedia.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: MedPress.

Theresia, Aprilia, *et. al.* 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.

Jurnal:

Cahyanto dkk, 2008. “*Efektifitas Komunikasi Partisipatif dalam Pelaksanaan Prima Tani di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat*” *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Volume 06. No.1

Handoko, dkk, 2014. “*Komunikasi Partisipatif dalam Proses Pembangunan Bendungan Matenggeng Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*” *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Volume 17. No 2.

Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). *Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2471–2491. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894>

Tesis :

Muchlis, Fuad, 2009. *Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Implementasi Musyawarah dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari)*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Wahyuni, Sri, 2006. *Proses Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor)*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Mulyasari,Gita, 2009. *Komunikasi Partisipatif Warga pada Bengkulu Regional Development Project (Kasus di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)*. Tesis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.